
ANALISIS DITERMINAN PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAMBI

Adi Putra¹

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi¹
putramm@yahoo.co.id

Suherman²

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi²
suhermanrika17@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran merupakan permasalahan serius dalam pembangunan yang sampai saat ini belum dapat dibenahi secara tuntas. Masalah tersebut menjadi masalah yang berkepanjangan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, karena negara berkembang belum mampu memberikan tunjangan kepada warganya yang menganggur. Berdasarkan publikasi BPS 2021 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi dari tahun 2018 meningkat 4,19% ke tahun 2019, kondisi tersebut menjadi persoalan daerah yang harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan menemukan solusi serta faktor-faktor penyebabnya.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data berkala (time series) yang meliputi data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/(Y), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/(X₁), dan Upah Minimum Provinsi (UMP)/(X₂), yang selanjutnya di analisis melalui untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel Independent terhadap variabel dependent. Hasil yang didapatkan dimana koefisien korelasi TPT dengan IPM bernilai positif dengan nilai 0,399 yang menggambarkan hubungan tidak signifikan, sedangkan antara TPT dengan UMP Provinsi Jambi sebesar 76,5, kategori signifikan. Berdasarkan pengujian hipotesis didapatkan Probability 0,0012 < 0,05 yang artinya secara bersama-sama IPM dan UMP berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Jambi, tetapi secara parsial pengaruh IPM terhadap TPT tidak berpengaruh signifikan dimana nilai probability (p) yang didapatkan sebesar 0,245 lebih besar 0,05, sedangkan pengaruh UMP terhadap TPT berpengaruh signifikan secara parsial karena nilai yang didapatkan sebesar 0,0007 lebih besar 0,05.

Kata kunci : pengangguran, IPM, UMP, Provinsi Jambi

PENDAHULUAN

Permasalahan Pengangguran merupakan permasalahan yang serius dalam pembangunan hingga saat ini dan belum dapat dibenahi secara baik dan masih menjadi masalah yang berkepanjangan khususnya negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan jumlah pengangguran yang tergolong masih besar. Rifqi, (2014) menjelaskan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai masalah sebagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang pada umumnya, salah satu permasalahan tersebut adalah masalah pengangguran karena dapat menimbulkan beban sosial yang tinggi.

Pengangguran merupakan persoalan makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Tidak mengejutkan lagi jika

pengangguran merupakan topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik. Sehingga para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka ajukan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru (Mankiw dalam Luthfi, 2019). Pemasalahan pengangguran dapat mempengaruhi manusia secara langsung dan harus mendapatkan penanganan yang tepat agar teratasi, dimana tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara.

Tingkat pengangguran juga merupakan indikator yang biasa digunakan oleh pelaku pasar valuta asing untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara, rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian negara hal ini akan berdampak pada besarnya peluang untuk berinvestasi. Tingginya tingkat pengangguran juga akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Dalam hal ini, karena di negara berkembang tidak mampu menghadapi masalah tersebut dengan memberikan tunjangan kepada warga yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan tersebut (Budhi dalam Sirait dkk, 2013 & Soleh dkk, 2019) .

Masalah pengangguran ini bukanlah suatu masalah yang baru dan juga terdapat di hampir seluruh provinsi di kepulauan Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang menghadapi persoalan sosial ekonomi seperti tingginya angka pengangguran. Persoalan ini dipengaruhi rendahnya pendidikan angkatan kerja, yang menyebabkan sulit memperoleh pekerjaan di sektor industri, sedangkan perusahaan menetapkan upah minimum provinsi yang tinggi untuk angkatan yang terdidik, yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di kalangan angkatan yang kurang terdidik. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jambi agar berperan untuk mencari solusi bersama dalam proses perbaikan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Perkembangan penduduk Provinsi Jambi terus meningkat, untuk itu perluasan lapangan kerja arus sejalan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pemerintah harus mengatasi permasalahan ini, jika perluasan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk maka semakin besar tingkat pengangguran. Selain itu masyarakat juga harus bekerja sama dalam meningkatkan skill dan produktivitasnya agar dapat menambah output sehingga berdampak pada bertambahnya pendapatan dan dapat memperluas lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar

kerja untuk itu perluasan lapangan kerja diperlukan untuk mengimbangi penyerapan angkatan kerja, jika tidak adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan sumber daya yang ada harus mampu menafsirkan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004) .

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) perkembangan angkatan kerja, pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,87% kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 3,86% dan mengalami peningkatan kembali sebesar 4,19% di tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar terjadi peningkatan 69,99%, selanjutnya meningkat lagi di tahun 2018 sebesar 70,65% serta tahun 2019 sebesar 71,26%. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi juga berfluktuatif dimana pada tahun 2017 sebesar 8,25 % meningkat menjadi 8,71% di tahun 2018, selanjutnya turun hingga 6,97% pada tahun 2019.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan di atas maka peneliti ingin melihat bagaimana hubungan IPM dan UMP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi serta bagaimana pengaruh IPM dan UMP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan yang diteliti apa adanya dan data yang digunakan berbentuk angka-angka. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas yaitu data Indeks Pembangunan Manusia (X1), dan Upah Minimum Provinsi (X2) terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Jambi periode tahun 2003-2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berorientasi pada analisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, literature, studi pustaka dan sumber yang mempunyai hubungan dengan objek

penelitian dan data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel, dengan data bersumber dari publikasi berupa data berkala (*time series*) yang selanjutnya data yang telah terkumpul tersebut di analisis melalui analisis kuantitatif dengan analisis korelasi dan regresi linear. Menurut Arikunto, (2013) penelitian korelasi merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk mengetahui adanya hubungan tinggi atau rendah antara kedua variabel dilihat berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan penafsiran atau interpretasi angka (Sugiyono, 2011).

Metode analisis selanjutnya untuk menjawab permasalahan kedua mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi menggunakan metode analisis regresi berganda dengan data sekunder selama periode tahun 2003-2019. Alat yang digunakan dalam permasalahan ini menggunakan persamaan ekonometrika dalam bentuk aplikasi *SPSS* sebagai berikut (Gujarati, 2003) $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ Dimana Y (Tingkat Pengangguran Terbuka), X_1 (Indeks Pembangunan Manusia), X_2 (Upah Minimum Provinsi.) β_0 (Konstanta), β_1 , β_2 (Koefisien regresi) e (Error term). Pengujian Hipotesis selanjutnya dengan Uji statistik yang terdiri dari pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian signifikansi simultan (Uji F) dan pengujian signifikansi individu (Uji t).

HASIL

Hasil analisis korelasi didapati hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi, sebagaimana hasil olahan data yang terlihat dari tabel 1 dan 2 pada lampiran dimana koefisien korelasi (r_{x1y}) tingkat pengangguran terbuka bernilai positif yaitu sebesar 0,399 dengan korelasi kedua variabel bersifat searah dengan kategori rendah karena besar nilai koefisien (r_{x1y}) terletak diantara 0,20 – 0,399 artinya jika indeks pembangunan manusia tinggi maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi juga tinggi. Namun bila dilihat dari tingkat signifikansi (*Sig 2-tailed*) yang berada dikisaran 0,112 > 0,05 artinya hubungan variabel indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi positif namun tidak signifikan.

Hasil analisis Hubungan UMP terhadap TPT di Provinsi Jambi diperoleh, koefisien korelasi (r_{x2y}) bernilai negatif sebesar 0,765 artinya besar hubungan UMP dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sebesar 76,50 persen yang nilai koefisien (r_{x2y})

terletak diantara 0,60 – 0,799. Namun bila dilihat dari tingkat signifikansi (*Sig 2-tailed*) yang berada dikisaran $0,000 < 0,005$ yang artinya hubungan variabel upah minimum provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi terbukti negatif dan signifikan.

Pengaruh IPM dan UMP terhadap TPT dari hasil analisis regresi berganda menggunakan aplikasi *software Eviews 8*. Tergambar pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil analisis regresi linear berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.906716	3.150865	-0.287767	0.7777
IPM	2.000310	1.648484	1.213424	0.2450
UMP	-0.345794	0.079776	-4.334572	0.0007
R-squared	0.617210	Mean dependent var		0.701765
Adjusted R-squared	0.562526	S.D. dependent var		0.123097
S.E. of regression	0.081419	Akaike info criterion		-2.019635
Sum squared resid	0.092806	Schwarz criterion		-1.872598
Log likelihood	20.16690	Hannan-Quinn criter.		-2.005019
F-statistic	11.28678	Durbin-Watson stat		2.014152
Prob(F-statistic)	0.001204			

Sumber : Data diolah dengan software Eviews 8

Pada tabel 3. Tersebut di peroleh model persamaan regresi linear berganda $Y = -0.906716 + 2.000310IPM - 0.345794UMP$ sebagaimana tergambar di Tabel 3 pada lampiran. Nilai konstanta β_0 sebesar -0,906716 artinya bahwa jika indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi adalah nol atau tidak berubah maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0,90 persen. Koefisien indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi sebesar 2,000310 artinya setiap kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 2 persen. Koefisien upah minimum provinsi di Provinsi Jambi sebesar - 0,345794 artinya setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,34 persen.

Selanjutnya hasil uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) yaitu sebesar 0.001204 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar $5\% = 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Pengujian Secara Parsial (Uji t) Melihat hasil setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan uji t secara rinci.” “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana bahwa pengujian koefisien regresi dengan menggunakan $\beta_0 = 5\%$ (0.05) variabel indeks pembangunan manusia, dapat dilihat nilai t hitung 1.213 dengan probabilitas variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0.2450 atau lebih besar dari $\beta_0 = 0.05$ ($0.2450 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel indeks pembangunan manusia secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. pengujian koefisien regresi dengan menggunakan $\beta_0 = 5\%$ (0.05) variabel upah minimum provinsi, dapat dilihat nilai t hitung -4.334 dengan probabilitas variabel upah minimum provinsi sebesar 0.0007 atau lebih besar dari $\beta_0 = 0.05$ ($0.0007 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel upah minimum provinsi secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel bebas yaitu variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka.”Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.6170 hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi mampu menjelaskan tingkat pengangguran terbuka sebesar 61.72 persen sisanya 38.28 persen variabel lainnya yang tidak termasuk dalam persamaan pada penelitian ini.

Hubungan variabel indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi positif namun tidak signifikan. Kondisi tersebut menggambarkan dimana keratifitas menciptakan lapangan kerja baru di Provinsi Jambi masih belum maksimal sehingga etos kerja relative rendah. Kondisi tersebut juga menggambarkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang dilihat dari indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, akan tetapi dampaknya terhadap menekan pengangguran terbuka di Provinsi Jambi masih relatif rendah.

Hubungan variabel upah minimum provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi terbukti negatif dan signifikan. Kondisi tersebut menggambarkan Utngginya UMP dapat menyebabkan angkatan kerja meningkat karena dengan adanya kenaikan upah

dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk bekerja, sehingga jumlah penawaran tenaga kerja yang ada semakin berkurang. Hal ini dikarenakan para pengusaha banyak menggunakan tenaga kerja kontrak dan lebih memilih untuk menggunakan tenaga kerja yang kualitasnya lebih baik, sehingga dampak dari kebijakan tersebut salah satunya yaitu adanya pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja yang kualitasnya masih tidak memadai.

Peningkatan UMP dapat menjadi beban bagi pengusaha dalam memperoleh profit karena biaya operasional perusahaan meningkat dikarenakan para pengusaha harus membayar gaji/upah para karyawannya diatas upah minimum yang ditetapkan setiap daerah masing-masing. Disisi lainnya kenaikan upah minimum disuatu daerah dapat menyebabkan pendapatan pemerintah daerah juga akan meningkat. Peningkatan upah minimum provinsi mendorong kualitas tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak positif terhadap profit perusahaan. Jangka panjangnya, tentu perusahaan menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya baik dalam bentuk investasi dalam negeri maupun luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang hubungan dan pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi dapat ditarik kesimpulan dimana terdapat hubungan indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Hubungan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Hasil analisis pengaruh didapatkan indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi secara bersama-sama. tetapi secara parsial variabel independent indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi, sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu ada upaya melakukan atau melaksanakan kegiatan dalam peningkatan pendapatan daerah dalam investasi dan indeks pembangunan manusia harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu upah minimum provinsi. Sehingga akan dapat meminimalisir tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, R., D. & H. (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro *Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013 (Online)*. (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/>, diakses 7 November 2013).
- Algifari, (2010) *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. YKPN: Yogyakarta
- Arsa, I K., (2015) Pengaruh Kinerja Kenangan Terhadap Alokasi Belanja. Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2016-2015. Universitas Udayana.
- Arsyad, L. (2010) *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE: Yogyakarta.
- Boediono. (2010) *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE: Yogyakarta.
- Basri, Y. Z., & Subri, M. (2005). *Keuangan Negeri dan Analisis Kebijakan Luar Negeri*. Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Perkasa.
- Duwi, P. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tandiawan, E. (2013). Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012. *Jurnal Berkala Umiah Efisien, 5 (1)*.
- Handoko, T. H. (2008). *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi Edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Luthan, (2014). *Beberapa Aspek Pembangunan Industri di Daerah dan Pemerataan Pembangunan Indonesia*,
- Kuncoro, S. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mulyadi, (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Nana, P. (2014). Pengaruh kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *Jurnal Akuntansi Vol.6 No.3*.
- Rahardjo, (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Graha Ifmu: Yogyakarta
- Reza dkk, 2016, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8*.

Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Soleh, A., Daniel, P. A., & Siswoyo, S. (2019). Analisis Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 7(2), 98-107.

Sukirno, S. (2013) Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar-Dasar Kebijakan. Prenada Media Crisp; Jakarta

Suliyanto, (2011) Statistika Nonparametik Dalam Statistik Penelilian. Andi Publisher: Yogyakarta.

Todaro, (2013) Pembangunan Ekonomi. Erlangga: Jakarta